INDOTEXTILES
The Indonesian Textiles, Apparel & Fashion Community Reference

Momentum dan Mendorong Inovasi Global di Industri Mode dan Tekstil

Industri tekstil saat ini tengah menghadapi lanskap bisnis yang terus berubah, lengkap dengan berbagai tantangan. Namun, kondisi yang dinamis ini juga membuka peluang besar, didorong oleh meningkatnya permintaan dari pasar berkembang, kemajuan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen. Untuk membantu pelaku industri beradaptasi dan menemukan jalur pertumbuhan, Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition akan digelar pada 2 – 4 September 2025 di National Exhibition and Convention Center, Shanghai.

Dengan meningkatnya jumlah pengunjung domestik dan internasional dalam beberapa edisi terakhir, pameran ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil dan pertukaran inovasi terdepan di dunia.

Tiga Dekade Keunggulan: Memasuki Babak Keempat Intertextile Apparel :Edisi musim gugur 2024 menandai perayaan 30 tahun

Intertextile, dengan hampir 4.000 peserta pameran dari 26 negara dan wilayah, serta kunjungan lebih dari 100.000 orang — jumlah pengunjung internasional naik 29% dibandingkan tahun sebelumnya. Momentum ini berlanjut di edisi musim semi 2025, yang mencatat hampir 95.000 pengunjung dari 131 negara dan wilayah, atau naik 17%.

Ms Wilmet Shea, General Manager Messe Frankfurt (HK) Ltd, menekankan pentingnya pameran ini: “Pertumbuhan Intertextile dari dekade ke dekade membuktikan kemampuannya menghubungkan pemasok global dengan pembeli visioner. Meski pasar saat ini penuh ketidakpastian, jangkauan internasional pameran ini justru membuka peluang bisnis di seluruh rantai nilai tekstil. Fokus kami pada inovasi dan tren desain terbaru menjadi komitmen kami terhadap keberlanjutan dan transformasi digital. Ini terlihat di berbagai zona khusus, seperti Digital Solutions Zone, Premium Wool Zone, dan Verve for Design, yang menjadi tempat penting bagi pembeli untuk tetap mengikuti perkembangan. Sementara itu, inisiatif Texpertise Econogy memperkuat komitmen kami terhadap keberlanjutan dan transformasi digital — dua pilar masa depan industri.”

Sebagai salah satu platform pengadaan terbesar di industri ini, Intertextile Apparel terus menjadi pusat tren global melalui zona-zona beragam, seperti Accessories Vision, Beyond Denim, Functional Lab, dan SalonEurope. Di edisi 2024, dua zona baru juga diluncurkan: Econogy Hub, yang fokus pada solusi berkelanjutan, dan Digital Solutions Zone, sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan AI, blockchain, dan IoT dalam rantai pasok — yang kini membantu meningkatkan transparansi, mengurangi limbah lewat sampling virtual 3D, dan mengoptimalkan logistik dengan analitik prediktif.

Digital Solutions Zone: Wadah Inovasi Digital : Digital Solutions Zone dan sesi seminar terkait kini menjadi pilihan utama bagi peserta pameran seperti Quaternion, Shima Seiki, dan Symmpix, yang menampilkan inovasi seperti peramalan permintaan berbasis AI, sampling virtual 3D (yang dapat mengurangi limbah kain hingga 30%), dan paspor produk digital untuk mendukung praktik pengadaan yang etis.

Mr Herman Chan, General Manager Symmpix, mengatakan "Zona ini sangat sesuai dengan arah pengembangan kami. Kami bertemu pembeli yang mencari solusi transformasional — mulai dari AI generatif untuk desain hingga sistem produksi yang dipersonalisasi. Bahkan di hari pertama, kami sudah terhubung dengan klien yang ingin langsung mengaplikasikan solusi ini dalam bisnis mereka."

Premium Wool Zone: Merespons Tren Pakaian Kustom dan Bahan Mewah : Meningkatnya posisi China sebagai produsen pakaian kustom kelas dunia telah mendorong permintaan akan kain mewah, baik dari individu maupun merek yang mengutamakan pakaian unik, penuh gaya, dan berkelas. Premium Wool Zone, yang identik dengan warisan dan kualitas, bersama Paviliun Milano Unica, menghadirkan 50 peserta pameran wol premium di zona SalonEurope. Beberapa nama ikonik yang tampil termasuk Abraham Moon & Sons (UK), Albini (Italia), Cavallo 1886 (Italia), dan Scabal NV/SA (UK) — semuanya memamerkan kain Eropa berkualitas tinggi yang sangat diminati pembeli asal Tiongkok.

Mr Federico Veronese, Sales Manager E.Thomas S.p.A, : "Sejak pertama kali ikut di tahun 1998, Intertextile Apparel sangat penting bagi kami. Kerjasama di industri tekstil itu vital, dan pameran ini membuka jalan bagi kami untuk terhubung dengan

pelanggan di Tiongkok. Italia dikenal dengan produk wol berkualitas tinggi dan kreatif. Pasar Tiongkok sangat penting bagi kami, dan kami berencana terus berinvestasi di sana."

Premium Wool Zone pun terus berinovasi. Di edisi musim gugur tahun ini, area khusus Functional Suiting Display akan kembali dihadirkan, memungkinkan peserta pameran menampilkan lebih banyak potensi dan fleksibilitas material mereka.

Verve for Design: Jembatan Kreativitas Global dan Pasar Lokal : Verve for Design, yang menjadi wadah bagi tren pola dan motif terkini, kini menarik perhatian dunia mode Tiongkok, di mana para desainer muda mencari pola unik untuk mewujudkan ide kreatif mereka. Studio-studio seperti Atelier Mineeda (Jepang), Longina Phillips Designs (UK), dan PHN Studio (Argentina) ikut berpartisipasi, menghubungkan kreativitas global dengan kebutuhan lokal yang dinamis.

Ms Lucia Mu, Pattern Consultant PHN Studio, mengungkapkan "Arus pengunjung di Intertextile luar biasa. Kami terhubung dengan klien dari Tiongkok hingga Amerika Selatan yang mencari desain berkelanjutan — banyak dari mereka menggabungkan motif eco-friendly kami dengan bahan mereka sendiri untuk menciptakan koleksi yang berkesan."

Musim gugur ini, zona ini akan kembali memberikan kesempatan bagi desainer dan studio dari seluruh dunia untuk bertemu langsung dengan produsen pakaian dan merek baru yang tengah mencari motif-motif inovatif.

Pameran ini diselenggarakan oleh Messe Frankfurt (HK) Ltd, Sub-Council of Textile Industry, CCPIT, dan China Textile Information Centre. Akan digelar bersamaan dengan Yarn Expo Autumn, CHIC, dan PH Value di National Exhibition and Convention

Center, Shanghai — menghadirkan keseluruhan rantai nilai industri tekstil dalam satu lokasi.

Info lebih lanjut: www.intertextileapparel.com

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition 2025

Tanggal: 2 – 4 September 2025

Salam,
Tim Redaksi

ISI EDISI ke-91

Berita Utama

- RUU Pertekstilan Diharapkan Jadi Penopang Industri Padat Karya Nasional

Berita Terbaru

- Prabowo Perpanjang Insentif Pajak untuk Buruh Padat Karya Hingga 2026
- Pan Brothers Tinggalkan API, Fokus pada Strategi Global dan Keberlanjutan
- Industri Tekstil Terjepit, Pengusaha Desak Pembatasan Impor
- BRICS+ Fashion Summit dan Peluang Tekstil Indonesia di Pasar Global
- Tekstil Indonesia Masih Punya Harapan, Bukan Sunset Industry
- Dorong Manufaktur Capai 20% PDB, APSyFI Desak Pemerintah Kendalikan Impor Tekstil
- Pernyataan Menkeu Purbaya Disambut Positif, Kuota Impor Tekstil Masih Dipertanyakan
- KAHMI Tuding Oknum Pejabat Kemenperin Terlibat Mafia Impor Tekstil
- Kemenperin Klarifikasi Mekanisme Impor Tekstil dan Bantah Jadi Penyebab PHK Massal

- Apindo Dorong Kolaborasi Perkuat Daya Saing Industri Tekstil
- EU-CEPA, Tekstil hingga CPO Jadi Motor Penguatan Ekspor Indonesia ke Eropa
- Wamenperin Buka Suara soal Kebangkrutan Raksasa Tekstil Bandung
- Menaker Tanggapi Pailitnya Raksasa Tekstil Bandung SBA Textile
- IKA Tekstil Desak Pemerintah Perketat Impor untuk Selamatkan Industri TPT

BERITA UTAMA

RUU Pertekstilan Diharapkan Jadi Penopang Industri Padat Karya Nasional

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertekstilan dinilai mendesak untuk segera disahkan demi menjaga daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang saat ini berada di bawah tekanan berat, baik dari sisi domestik maupun global.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa, menegaskan dalam Musyawarah Nasional XVI bahwa RUU Pertekstilan harus menjadi instrumen hukum untuk memperkuat industri padat karya sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja. Ia menekankan bahwa keberlangsungan sektor ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah,

termasuk regulasi yang tengah dibahas di DPR RI.

RUU Pertekstilan telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Jemmy menyatakan bahwa regulasi yang kuat dibutuhkan agar iklim investasi di bidang tekstil dan garmen tetap terjaga. Selain itu, kehadiran payung hukum ini diharapkan dapat melindungi industri dalam negeri dari banjir impor produk jadi serta memperluas akses ekspor yang lebih kompetitif.

Industri TPT nasional saat ini menghadapi tantangan berat berupa derasnya arus impor, hambatan dagang global, hingga tarif ekspor ke Amerika Serikat yang mencapai 19 persen. Untuk pasar Uni Eropa, persyaratan yang ketat seperti penggunaan energi hijau dan penerapan two steps process juga menjadi tantangan tambahan bagi pelaku usaha.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sektor TPT. Menurutnya, industri tekstil harus diposisikan sebagai kepentingan strategis nasional mengingat perannya sebagai penyerap tenaga kerja yang besar. Ia menambahkan bahwa ekstensifikasi industri padat karya diperlukan untuk mendukung target penciptaan jutaan lapangan kerja sesuai visi Presiden Prabowo.

Sementara itu, Ketua BPD API Jawa Barat sekaligus Ketua OC Munas API 2025, Ian Syarif, menyatakan bahwa arah kebijakan lima tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan global. Ia menekankan pentingnya kebijakan strategis yang melindungi industri TPT nasional sekaligus menjaga daya saing di pasar internasional.

Dengan adanya RUU Pertekstilan, industri TPT diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan impor dan persaingan global, tetapi juga

bertransformasi menjadi sektor berkelanjutan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

BERITA TERBARU

Prabowo Perpanjang Insentif Pajak untuk Buruh Padat Karya Hingga 2026

Pemerintah memastikan kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung

pemerintah (DTP) bagi pekerja industri padat karya akan berlanjut hingga tahun depan. Insentif ini diberikan khusus untuk pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa insentif tersebut kembali menyasar sektor alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang berbahan kulit. Ia menegaskan bahwa langkah ini ditujukan untuk melindungi 1,7 juta pekerja yang berhak atas fasilitas tersebut. “Ini juga dilanjutkan yang [pekerja dengan gaji maksimal] Rp10 juta itu ditanggung pemerintah, targetnya 1,7 juta pekerja,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden RI, Senin (15/9/2025).

Anggaran untuk insentif padat karya pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp800 miliar dan dipastikan kembali masuk dalam kebijakan fiskal tahun depan. Selain itu, pemerintah juga memperpanjang pemanfaatan PPh final 0,5% bagi wajib pajak UMKM hingga 2029, serta melakukan penyesuaian atas skema tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi usaha.

Di sisi lain, usulan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah juga tengah disiapkan untuk 2026. Program ini nantinya diperluas ke berbagai kelompok pekerja seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga.

Sejak awal tahun, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus khusus bagi sektor padat karya. Kebijakan itu meliputi insentif PPh 21 DTP untuk industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur; diskon 50% iuran JKK bagi 3,76 juta pekerja selama enam bulan; serta dukungan revitalisasi mesin industri dengan subsidi bunga sebesar

5% melalui skema pembiayaan kredit tertentu.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga daya saing industri padat karya sekaligus melindungi pekerja dari tekanan ekonomi, khususnya di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

Pan Brothers Tinggalkan API, Fokus pada Strategi Global dan Keberlanjutan

PT Pan Brothers Tbk resmi mengundurkan diri dari keanggotaan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) setelah melalui pertimbangan panjang. Perusahaan menilai API sudah tidak lagi menjadi wadah yang tepat untuk mewakili kepentingan Pan Brothers maupun ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk, Anne Patricia Sutanto, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena organisasi tersebut dinilai telah bergeser dari tujuan awalnya, yakni menjadi platform bersama untuk memperjuangkan kepentingan seluruh pelaku usaha tekstil dan garmen di Indonesia. Menurutnya, langkah mundur ini memungkinkan Pan Brothers untuk lebih fokus pada strategi bisnis, komitmen keberlanjutan, serta kontribusi nyata dalam memperkuat industri tekstil Indonesia di kancah global.

Sejalan dengan dinamika global, Pan Brothers menilai diperlukan adanya wadah asosiasi baru yang lebih kolektif, inklusif, dan kondusif dalam menjaring serta memperkuat ekosistem industri TPT. Asosiasi semacam itu diharapkan dapat menghadirkan ruang kolaborasi yang sehat antar-pelaku industri, mendorong sinergi dengan pemerintah maupun mitra internasional, sekaligus menjadi representasi kuat bagi kepentingan industri tekstil nasional di tingkat dunia.

Bagi Pan Brothers, keberadaan asosiasi yang mumpuni sangat penting untuk menjadikan industri apparel dan tekstil tetap sebagai tulang punggung sektor padat karya, yang tidak hanya berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan sosial, keberlanjutan, dan nilai-nilai ekonomi Pancasila. Karena itu, pengunduran diri dari API dipandang sebagai langkah terbaik guna menjaga konsistensi dan komitmen perusahaan ke depan.

Meski tidak lagi menjadi bagian dari API, Pan Brothers menegaskan akan tetap berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk mendorong pertumbuhan industri TPT yang lebih berkelanjutan, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global. Komitmen perusahaan tetap terfokus pada agenda dekarbonisasi, efisiensi energi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan rantai pasok yang inklusif.

Industri Tekstil Terjepit, Pengusaha Desak Pembatasan Impor

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantui industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Ikatan Alumni

Institut Teknologi Tekstil-Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (IKA Tekstil) menyatakan keresahan atas kondisi tersebut, yang kini tidak hanya menimpa pekerja level operator, tetapi juga tenaga ahli hingga manajemen menengah.

Ketua Umum IKA Tekstil, Riady Madyadinata, mengungkapkan banjir produk impor, baik legal maupun ilegal, menjadi penyebab utama sulitnya penjualan produk dalam negeri. Harga produk lokal dinilai tidak mampu bersaing karena biaya produksi di Indonesia lebih tinggi sekitar 35%–40% dibandingkan barang impor. Menurutnya, faktor lain seperti tingginya biaya energi, logistik, kualitas sumber daya manusia, hingga budaya kerja internal perusahaan turut memperburuk daya saing industri.

Riady menambahkan, meski investasi asing, khususnya dari Tiongkok, mulai masuk ke Indonesia, langkah tersebut belum mampu menahan laju PHK maupun penutupan pabrik. Ironisnya, banyak tenaga ahli Indonesia kini lebih memilih berkarier di luar negeri karena industri TPT negara lain sedang berkembang pesat.

Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman, meminta Kementerian Perindustrian lebih transparan dalam mengumumkan penerima kuota impor. Ia menilai keterbukaan mutlak diperlukan agar masalah di sektor benang dan kain tidak terulang, terlebih data Badan Pusat Statistik menunjukkan impor bahan

tersebut terus meningkat dalam lima tahun terakhir sementara produsen lokal justru berguguran.

Meski demikian, Nandi menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025 yang mewajibkan importir umum diverifikasi sebelum memperoleh kuota impor. Ia menilai aturan ini bisa membuka peluang bagi industri kecil, terutama konveksi pakaian jadi. Namun, tanpa adanya pembatasan kuota yang jelas, industri dalam negeri akan tetap tertekan. Karena itu, ia mengusulkan agar impor pakaian jadi dan produk tekstil lainnya dibatasi maksimal 50 ribu ton per tahun. Dengan kapasitas produksi nasional mencapai 2,8 juta ton per tahun, terdiri dari 2 juta ton untuk kebutuhan domestik dan 500 ribu ton untuk ekspor, Nandi menegaskan kemampuan industri lokal sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

BRICS+ Fashion Summit dan Peluang Tekstil Indonesia di Pasar Global

Pada akhir Agustus hingga awal September lalu, sejumlah desainer fesyen dan perwakilan industri tekstil Indonesia menghadiri BRICS+ Fashion Summit dan Moscow Fashion Week di Moskwa, Rusia. Dari dua forum internasional tersebut, mereka membawa pulang optimisme untuk memperluas pasar tekstil Indonesia. Namun, agar mimpi itu terwujud, dukungan kuat dari pemerintah menjadi kunci utama.

BRICS saat ini beranggotakan 11 negara, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Indonesia, dan Iran. BRICS+ Fashion Summit sendiri mempertemukan perwakilan dari sekitar 100 negara untuk mempromosikan pasar mode yang sedang berkembang. Dari forum itu, muncul keyakinan bahwa BRICS memiliki potensi besar karena pasar yang mencakup hampir 60 persen populasi dunia.

Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah, Liliek Setiawan, yang turut hadir dalam acara tersebut menilai bahwa Rusia adalah salah satu negara yang potensial untuk dijajaki. Selama ini, impor terbesar Rusia untuk produk manufaktur adalah pakaian dan alas kaki. Dengan kondisi empat musim, masyarakat Rusia membutuhkan beragam produk sandang, terutama sepatu, yang sesuai dengan perubahan cuaca. Sayangnya, peluang ini belum banyak dimanfaatkan oleh industri tekstil Indonesia.

Lebih jauh, Liliek menekankan pentingnya pengembangan produk tekstil berbahan baku berkelanjutan atau sustainable material. Konsumen kelas menengah-atas di Rusia sangat menghargai produk berbasis serat alam, berbeda dengan konsumen Indonesia yang masih kurang peduli pada aspek tersebut. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar dengan beragam tanaman yang bisa diolah menjadi serat, mulai dari bambu, pisang, hingga nanas. Sayangnya, pengembangannya masih terbatas karena berbagai tantangan, mulai dari harga tinggi pada tahap awal hingga minimnya perhatian konsumen dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pasar ekspor pakaian jadi dari Indonesia selama ini masih didominasi Amerika Serikat dengan nilai ekspor 3,89 miliar dollar AS pada 2024, atau sekitar 54,9 persen dari total

ekspor. Selain AS, tujuan utama lainnya adalah Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Inggris. Rusia belum masuk dalam daftar 10 besar tujuan ekspor, sehingga peluang ekspansi masih sangat terbuka.

Namun, tantangan terbesar ada pada kondisi industri tekstil nasional yang saat ini cenderung defensif akibat serbuan produk impor. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Surakarta, Lukman Hakim, menegaskan bahwa industri tekstil Indonesia sulit melakukan ekspansi tanpa dukungan pemerintah. Ia membandingkan dengan China dan India yang mampu melakukan penetrasi pasar secara agresif berkat koordinasi dan dukungan kuat dari negara.

Lukman bahkan mengusulkan agar pemerintah membentuk kementerian khusus yang menangani sektor sandang, mengingat pangan dan papan sudah memiliki lembaga yang mengurus secara khusus. Menurutnya, tanpa perhatian serius terhadap ketahanan sandang, industri tekstil dalam negeri akan semakin rentan.

Dengan peluang besar yang ditawarkan pasar global, terutama di negara-negara BRICS, Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain penting dalam industri tekstil dunia. Namun, hal itu hanya bisa terwujud jika ada sinergi nyata antara pelaku usaha dan pemerintah untuk memperkuat daya saing serta mendorong ekspansi ke pasar baru.

Tekstil Indonesia Masih Punya Harapan, Bukan Sunset Industry

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menegaskan bahwa industri tekstil Indonesia masih memiliki prospek cerah, asalkan biaya energi dan logistik bisa ditekan melalui dukungan infrastruktur yang memadai.

Menurutnya, anggapan bahwa tekstil merupakan sunset industry tidak sepenuhnya tepat. Pasar dalam negeri tetap besar karena kebutuhan masyarakat terhadap produk tekstil tidak akan pernah hilang. Permasalahan utama justru terletak pada mahalnya biaya listrik, logistik, serta infrastruktur pendukung lainnya yang membuat produk lokal kalah bersaing dengan barang impor.

Heri menjelaskan, efisiensi energi menjadi salah satu kunci penting. Jika pasokan energi lebih murah dan infrastruktur logistik memadai, subsektor tekstil akan kembali menarik perhatian investor. Dengan begitu, pembangunan kawasan industri tekstil yang lebih spesifik dan tematik berpeluang besar untuk terwujud.

Ia menambahkan, peran pemerintah sangat krusial dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kebangkitan industri tekstil. Investasi di sektor energi, air, serta logistik dapat menciptakan efisiensi produksi, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

Menurut Heri, yang dibutuhkan adalah kebijakan konsisten dan terarah untuk mendorong pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan industri. Dengan dukungan tersebut, tekstil sebagai sektor padat karya dapat terus berkembang dan mempertahankan perannya sebagai penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dorong Manufaktur Capai 20% PDB, APSyFI Desak Pemerintah Kendalikan Impor Tekstil

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menilai target kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 20% dapat dicapai tahun ini apabila pemerintah serius dalam mengurangi porsi impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menegaskan bahwa masalah utama industri manufaktur, khususnya TPT, adalah kurangnya persaingan yang adil di pasar domestik akibat banjir produk impor murah.

Menurut Redma, ketersediaan pasar dalam negeri semakin menyempit karena banyaknya produk impor ilegal maupun legal dengan harga murah yang mendominasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tren kenaikan impor TPT dari tahun ke tahun. Pada 2016, impor benang tercatat sekitar 230.000 ton dan kain 724.000 ton. Namun, pada 2024 angkanya melonjak menjadi 462.000 ton untuk benang dan 939.000 ton untuk kain. Kondisi ini mengindikasikan adanya disintegrasi industri, khususnya di sektor TPT nasional.

Ia menambahkan, tantangan global berupa perang dagang dan ketidakpastian geopolitik yang menekan ekspor dapat diantisipasi bila pasar domestik dijaga. Namun, jika pemerintah membiarkan persaingan bebas dengan produk dumping dan ilegal, maka

diperlukan insentif signifikan untuk menekan biaya produksi hingga 40% agar persaingan tetap seimbang. Redma menyoroti pentingnya efisiensi ongkos produksi dari sisi energi, pajak, hingga bunga pinjaman, sementara faktor upah perlu tetap terjaga agar daya beli masyarakat tidak melemah.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menargetkan kontribusi manufaktur terhadap PDB dapat mencapai 20,8% pada 2025, naik dari baseline 2024 yang sebesar 18,98%. Target tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 mengenai Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yang menjadi pedoman pembangunan nasional di tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sekaligus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

BPS mencatat kontribusi industri pengolahan terhadap PDB pada kuartal II/2025 mencapai 18,67% year on year (YoY), turun dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 19,25% YoY. Meski demikian, angkanya masih lebih tinggi dibanding kuartal II/2024 yang tercatat 18,52% YoY. Dengan upaya serius dalam mengendalikan impor dan mendorong efisiensi industri, APSyFI optimistis target 20% kontribusi manufaktur dapat terwujud.

Pernyataan Menkeu Purbaya Disambut Positif, Kuota Impor Tekstil Masih Dipertanyakan

Kalangan pertekstilan nasional menyambut positif peryataan Menteri Purbaya terkait pemberantasan penyelundupan dan barang-barang illegal. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonssia (APSyFI), Redma Gita Wirawata menyatakan bahwa agenda ini telah menjadi usulan yang di dorong seluruh kalangan pertekstilan nasional dalam 3 tahun terakhir.

Menurut Redma, kalangan produsen tekstil nasional telah muak dengan praktik importasi illegal dan hampir putus asa karena usulannya selalu kandas terutama karena dugaan keterlibatan oknum pejabat ASN hingga oknum aparat serta politisi didalamnya. “Pernyataan menkeu kemarin membawa harapan baru bagi kami bahwa pemerintah secara bertahap mulai melakukan perbaikan khususnya dalam agenda birokrasi bersih, terlebih sebelumnya Presiden telah mengangkat DirJen Bea Cukai dari kalangan militer” ungkap Redma.

Harapan baru industry TPT nasional ini didasarkan pada data tradmap.org bahwa setiap tahunnya sekitar USD 1,5-2 milyar importasi TPT dari China tidak tercatat di Bea Cukai, dimana jumlah ini setara dengan 28.000 kontainer barang impor illegal. “Dengan pernyataan menkeu kemarin setidaknya 1 masalah ada titik cerah untuk

diatasi, tinggal kami menyelesaikan permasalahan lain yaitu tingginya kuota impor" ungkap Redma. "Saat ini kami tengah intens berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian terkait dengan perhitungan supply-demand, agar kedepan besaran kuota yang diterbitkan tidak mematikan produsen lokal" tegasnya.

Namun pernyataan Redma ini justru disesalkan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Direktur Eksekutif KAHMI, Agus Riyanto mengatakan pihaknya sangat pesimis jika Kemenperin mau menurunkan kuota impor karena tuntutan dari mafia kuota impor justru akan meminta kuota yang lebih besar. "Dan Kemenperin pasti akan mengikuti permintaan mereka karena beberapa oknum pejabat kemenperin terlibat aktif dalam jaringan mafia ini" ujar Agus.

Agus justru meminta aparat penegak hukum untuk turun melakukan penyelidikan karena praktik ini telah terjadi lebih dari 5 tahun. Pihaknya juga menyayangkan sikap menteri perindustrian yang seakan tidak peduli dengan kondisi ini. "Kalau Pa Menteri tidak tahu siapa saja pemainnya, artinya Pa Menteri tidak berkompeten memimpin kementerian" ujar Agus. "Aneh jika menteri tidak tahu pejabat dibawahnya yang berwenang menerbitkan Pertek? " tegasnya.

Kemudian Agus menjelaskan bahwa oknum pejabat ini selalu beralasan jika kuota impor diberikan karena produsen dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Disini seharusnya Pa Menteri membuka mata dan telinga lebih lebar, tutupnya puluhan perusahaan yang mem-PHK ratusan ribu karyawan justru diakibatkan oleh tingginya kuota impor dari Kemenperin kepada rekanan perusahaan para oknum pejabat ini" terang Agus. "Diantara yang ter-PHK itu adalah

profesional tekstil anggota KAHMI" tambahnya.

Namun Agus setuju jika saat ini upaya perbaikan secara bertahap telah dilakukan oleh Presiden Prabowo dimana birokrasi bersih jadi agenda utama termasuk dengan pergantian DirJend Bea Cukai yang disusul Menteri Keuangan. "Jadi kita harus bantu Presiden membersihkan kotoran-kotoran birokrasi ini, kalau menterinya tidak mau ikut membereskan, sekalian saja dibersihkan juga" katanya. "Kami sangat kesal ketika saudara-saudara kami terkena PHK karena ulah kotoran birokrasi ini" pungkasnya.

Sebelumnya, keresahan yang sama diungkapkan oleh Ikatan Keluarga Alumni Institut Teknologi Tekstil-Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (IKA Tekstil) dan Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) terkait tingginya barang impor yang menyebabkan anggotanya ter-PHK dan gulung tikar. Bahkan IPKB meminta secara tegas kuota impor untuk pakaian jadi tidak melebihi 50 ribu ton pertahun mengingat kapasitas produksi garment nasional sudah mencapai 2,8 juta ton. IPKB juga meminta Kementerian Perindustrian transparan dalam menghitung supply-demand dan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan kuota impor.

KAHMI Tuding Oknum Pejabat Kemenperin Terlibat Mafia Impor Tekstil

Majelis Rayon Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) melontarkan

tudingan serius terkait keterlibatan sejumlah pejabat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam jaringan mafia impor tekstil. Dugaan ini dinilai sebagai salah satu penyebab melemahnya industri tekstil dalam negeri yang terus tergerus oleh produk impor murah.

Direktur Eksekutif KAHMI, Agus Riyanto, menyebutkan bahwa harapan terhadap kebijakan pengetatan impor semakin tipis akibat kuatnya pengaruh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan besar di balik bisnis impor. Ia menegaskan, beberapa oknum pejabat Kemenperin diduga aktif dalam jaringan mafia tersebut sehingga aturan lebih berpihak pada importir besar ketimbang melindungi produsen lokal.

Menurut Agus, praktik mafia impor tekstil tidak hanya merugikan pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga mengancam keberlangsungan tenaga kerja di sektor manufaktur. Ribuan pekerja disebut terancam kehilangan pekerjaan seiring semakin banyaknya pabrik yang gulung tikar karena kalah bersaing.

KAHMI menilai mafia impor turut menyebabkan harga bahan baku dalam negeri tidak kompetitif, yang semakin memperburuk kondisi bisnis tekstil nasional. Oleh karena itu, mereka mendesak aparat penegak hukum segera turun tangan menelusuri dugaan keterlibatan pejabat Kemenperin agar praktik mafia impor bisa diberantas.

“Ini soal keberpihakan negara kepada rakyatnya. Apakah kita rela melihat industri tekstil nasional hancur hanya karena kepentingan segelintir orang?” tegas Agus.

Pemerintah sebelumnya sempat menjanjikan penataan ulang tata niaga impor untuk memperkuat industri dalam negeri. Namun, hingga kini realisasi kebijakan tersebut masih

minim. Pihak Kemenperin sendiri belum memberikan tanggapan atas tudingan KAHMI terkait mafia impor ini.

Kemenperin Klarifikasi Mekanisme Impor Tekstil dan Bantah Jadi Penyebab PHK Massal

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa impor tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak seluruhnya dilakukan melalui mekanisme pertimbangan teknis (pertek). Penjelasan ini disampaikan sebagai respons terhadap tudingan sejumlah pihak yang menyebut Kemenperin sebagai penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor TPT akibat lemahnya tata niaga impor.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, menekankan bahwa terdapat kesalahpahaman dalam melihat data impor. Ia menjelaskan bahwa instrumen yang dimiliki Kemenperin hanya sebagian dari rantai ekosistem importasi tekstil, sedangkan impor terbesar justru tidak berasal dari alokasi pertek. Febri menambahkan bahwa kesenjangan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan pertek tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan kebijakan Kemenperin, sebab barang impor juga dapat masuk melalui Kawasan Berikat, impor borongan, maupun jalur ilegal.

Saat ini terdapat 1.332 pos tarif atau kode HS untuk industri TPT dari hulu hingga hilir, di mana 941 HS masuk kategori larangan

terbatas (lartas) dengan kewajiban perizinan impor (PI) dan pertek sesuai Permendag Nomor 17 Tahun 2025. Selain itu, sebanyak 980 HS diwajibkan memenuhi persyaratan Laporan Surveyor (LS). Sebelumnya, di Permendag Nomor 8 Tahun 2024, hanya 593 HS yang diatur perteknya. Perubahan ini menunjukkan bahwa lonjakan impor TPT terjadi saat banyak HS tidak termasuk dalam pengaturan lartas maupun LS.

Febri juga menjelaskan bahwa sejak 2017 mekanisme impor TPT selalu didasarkan pada aturan resmi. Ia mencontohkan, pada periode 2017–2022, alokasi impor dilakukan dengan mengacu pada data kebutuhan tahunan yang disusun Kemenperin melalui rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Perekonomian. Perubahan signifikan terjadi pada 2022 dengan terbitnya Permenperin 36/2022 yang memperkenalkan mekanisme verifikasi kemampuan industri (VKI). Data menunjukkan pada 2023 volume impor serat dan benang yang disetujui VKI relatif sejalan dengan angka BPS, meski pada benang tercatat lebih tinggi.

Pada 2024, melalui Permenperin 5/2024, mekanisme pertek kembali diperkuat dengan masa berlaku per tahun takwim. Hasilnya, jumlah perusahaan yang disetujui meningkat menjadi 542, sementara persentase pertek terhadap total impor BPS untuk serat dan benang menunjukkan perbaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Lebih lanjut, sejak Agustus 2025, kewenangan pertek untuk impor pakaian jadi juga dilimpahkan ke Kemenperin agar seluruh rantai industri TPT dapat berada dalam pengaturan yang lebih jelas.

Febri menegaskan bahwa Kemenperin terbuka terhadap pelaporan jika ada dugaan kecurangan dalam penerbitan pertek. Ia menambahkan bahwa mekanisme impor tetap merujuk pada aturan Permendag, dengan pengecualian bagi Kawasan Berikat,

Gudang Berikat, KPBPB, Importir Jalur Prioritas, Pusat Logistik Berikat, KEK, AEO, MITA Produsen, serta KITE.

Menurutnya, angka yang terlihat rendah dalam pertek maupun VKI justru mencerminkan selektivitas pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan perlindungan produk dalam negeri. Ia menutup dengan menegaskan bahwa mekanisme pengaturan impor TPT dijalankan secara konsisten, transparan, dan akuntabel.

Apindo Dorong Kolaborasi Perkuat Daya Saing Industri Tekstil

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwa persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak bisa dikaitkan dengan satu kementerian atau pihak tertentu saja. Ketua Bidang Perdagangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional Unsur Pengusaha, Anne Patricia Sutanto, menyampaikan bahwa permasalahan di industri TPT bersifat kompleks dan harus dilihat secara menyeluruh.

Anne menilai tudingan yang menyalahkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai penyebab terjadinya PHK tidaklah tepat. Menurutnya, dibutuhkan pemikiran berbasis data, dialog intensif, dan strategi bersama untuk menemukan solusi yang efektif. Pernyataan yang menyudutkan,

ujarnya, justru berisiko memecah belah dan menjauhkan semua pihak dari upaya perbaikan nyata.

Momentum perjanjian dagang Indonesia dengan Kanada serta Uni Eropa, menurut Anne, seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat daya saing industri TPT dari hulu hingga hilir. Ia menekankan bahwa iklim usaha sektor ini perlu dibenahi secara kolaboratif melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dengan berlandaskan rasa saling percaya.

“Kepercayaan antar-stakeholders menjadi kunci untuk memperkuat industri padat karya ini,” ujarnya.

Apindo, kata Anne, tetap berkomitmen untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Ia juga menyoroti perlunya investasi di industri hulu, terutama pada modernisasi mesin serta riset dan pengembangan produk. Menurutnya, banyak mesin yang digunakan saat ini sudah berusia tua, sehingga investasi pada teknologi baru dan pengembangan produk sangat dibutuhkan agar industri semakin kompetitif dan bernilai tambah.

EU-CEPA, Tekstil hingga CPO Jadi Motor Penguatan Ekspor Indonesia ke Eropa

Produk unggulan Indonesia seperti tekstil, furnitur, dan crude palm oil (CPO) diproyeksikan tetap menjadi andalan ekspor

ke pasar Eropa setelah implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kesepakatan perdagangan bebas yang menghapus hingga 98% tarif ini diyakini akan membuka peluang besar bagi produk nasional agar semakin kompetitif di pasar global.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, menyebut IEU-CEPA sebagai peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, produk manufaktur masih mendominasi ekspor Indonesia ke Uni Eropa, dengan tekstil, foodware, dan furnitur sebagai sektor utama. Sementara itu, CPO tetap menjadi penyumbang terbesar meskipun harus bersaing dengan minyak nabati lain di Eropa.

Ia menegaskan bahwa implementasi IEU-CEPA akan memperkuat posisi produk unggulan Indonesia di tengah kompetisi global. Harapannya, dengan penghapusan tarif, produk Indonesia dapat lebih unggul dalam persaingan pasar.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada tahun lalu mencapai US$ 30 miliar. Dengan adanya IEU-CEPA, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dari capaian tersebut. Tidak hanya dengan Uni Eropa, Indonesia juga telah menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Kanada melalui Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) yang memberikan preferensi tarif lebih dari 90% produk Indonesia, termasuk tekstil, elektronik, makanan olahan, dan sarang burung walet.

Budi menegaskan bahwa kedua perjanjian perdagangan strategis ini menjadi momentum penting untuk memperluas

pasar ekspor Indonesia. Dengan hambatan tarif yang semakin kecil, produk unggulan nasional memiliki peluang besar menembus pasar Eropa dan Amerika Utara. Pemerintah pun mendorong pelaku usaha agar memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pangsa pasar sekaligus meningkatkan daya saing ekspor Indonesia.

Wamenperin Buka Suara soal Kebangkrutan Raksasa Tekstil Bandung

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza angkat bicara terkait kebangkrutan PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), perusahaan tekstil asal Bandung, Jawa Barat, yang resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Faisol menyebut pihaknya telah memanggil asosiasi industri untuk mendalami persoalan yang terjadi serta mencari solusi agar tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

“Lagi dibahas bersama asosiasi,” ujarnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (29/9).

SBAT yang berdiri sejak 2003 tercatat mampu memenuhi sekitar 1 persen kebutuhan tekstil nasional dengan kapasitas produksi mencapai 20.000 ton per tahun. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen benang ramah lingkungan dengan orientasi ekspor ke pasar Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan. Namun, dalam putusan perkara No. 3/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt. Pst pada 29 Agustus 2025, pengadilan menetapkan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 hari kepada SBAT yang berujung pada vonis pailit.

Kasus serupa sebelumnya juga menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024. Perusahaan tekstil raksasa itu gagal melunasi utang mencapai US$1,597 miliar setelah terpukul dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan drastis jumlah pesanan produksi.

Kebangkrutan SBAT menambah daftar perusahaan tekstil besar Indonesia yang tumbang akibat tekanan keuangan, persaingan global, dan melemahnya industri tekstil nasional. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas sektor ini sekaligus melindungi tenaga kerja agar tidak terimbas gelombang PHK.

Menaker Tanggapi Pailitnya Raksasa Tekstil Bandung SBA Textile

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli angkat bicara mengenai pailitnya perusahaan tekstil asal Bandung, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) atau SBA Textile. Perusahaan tersebut resmi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2025.

Yassierli mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima informasi mengenai putusan tersebut. Namun, ia menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu laporan lebih lengkap untuk menindaklanjuti perkembangan kasus ini. “Iya, nanti kita dengarkan lebih lanjut,” ujarnya saat ditemui di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (30/9/2025).

SBA Textile sendiri merupakan produsen berbagai jenis benang yang juga pernah mengekspor produknya ke sejumlah negara, termasuk kawasan Eropa. Meski memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam industri tekstil, perseroan kini tidak

melakukan langkah hukum untuk menggugat putusan pailit tersebut. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen menyatakan tidak menempuh upaya hukum apapun terkait keputusan pengadilan dengan nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Jkt. Pst.

Seluruh aset SBA Textile saat ini telah diserahkan kepada tim kurator. Manajemen menyebutkan bahwa perusahaan akan membicarakan kepentingan pemegang saham publik dengan kurator sebagai bentuk upaya menjaga hak-hak investor. “Perseroan akan membicarakan hal ini kepada kurator terkait kepentingan pemegang saham masyarakat,” tulis manajemen dalam keterangannya.

IKA Tekstil Desak Pemerintah Perketat Impor untuk Selamatkan Industri TPT

Ikatan Keluarga Alumni Institut Teknologi Tekstil–Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (IKA Tekstil) mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang tengah menghadapi tekanan berat.

Ketua Umum IKA Tekstil, Riady Madyadinata, menyatakan bahwa keruntuhan industri TPT telah menyebabkan puluhan perusahaan gulung tikar dan ratusan ribu pekerja harus kehilangan pekerjaan. Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena industri TPT merupakan salah satu sektor

padat karya yang menopang perekonomian nasional. “Dengan deklarasi hari ini, kami yang merupakan bagian dari stakeholder akan menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan industri TPT nasional,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Riady menilai banjir produk impor, baik ilegal maupun legal melalui mekanisme kuota, menjadi penyebab utama keterpurukan industri dalam negeri. Ia juga menyoroti lemahnya penerapan instrumen perdagangan seperti antidumping dan safeguard, yang semakin membuka peluang masuknya produk murah dari luar negeri.

Ketua Tim Perumus Deklarasi IKA Tekstil, Ferly Norman, menambahkan perlunya perbaikan sistem impor melalui mekanisme preshipment inspection atau port to port manifest untuk menekan maraknya impor ilegal. Untuk impor berbasis kuota, Ferly mengusulkan pelarangan impor oleh importir umum, pembatasan jumlah pelabuhan masuk, serta kewajiban pelaporan faktur pajak. “Jangan asal kasih kuota impor, harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Selain pengetatan impor, IKA Tekstil juga mendorong pemerintah memberikan insentif yang dapat menekan biaya produksi, mulai dari energi, teknologi, hingga pembiayaan perbankan. Langkah ini diyakini mampu menghidupkan kembali industri TPT, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan terhadap upaya penyelamatan industri TPT juga datang dari Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB). Ketua Umum IPKB, Nandi Herdiaman, menilai praktik importasi borongan atau kubikasi menjadi salah satu jalur utama masuknya produk pakaian jadi ilegal ke Indonesia. Ia berharap Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai memperkuat komitmen untuk membendung praktik

tersebut. “Dengan begitu, produk lokal bisa kembali berjaya di pasar domestik,” pungkasnya.